

Hilirisasi Sawit: Mendorong Nilai Tambah di Tengah Persaingan Alokasi Bahan Baku

Industri sawit Indonesia menyerap 18 juta tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah USD 28 miliar pada 2024, sekaligus menguasai hampir 60% pasar CPO dunia. Namun, lonjakan permintaan energi terbarukan dan kebijakan biodiesel B40-B50 memicu persaingan alokasi CPO antara biodiesel, pangan, dan oleokimia yang tak bisa dikurangi. Harga CPO yang naik menguntungkan petani, tetapi menekan industri hilir. Karena itu, keseimbangan alokasi, hilirisasi, dan strategi ekspor menjadi kunci agar manfaat ekonomi tetap optimal. Mampukah Indonesia menjaga keseimbangan ini?

**Selengkapnya di halaman 6*

Kontribusi Ekonomi Sawit 2024: Peran Strategis dalam Perekonomian Nasional

Industri sawit memberi kontribusi besar bagi PDB, tetapi sering tak terlihat karena hanya dihitung dari perkebunan dan CPO, padahal *multiplier effect*-nya meluas ke pangan, kosmetik, kimia, energi, logistik, dan perdagangan. Dengan pendekatan NTB, kontribusi sawit 2024 mencapai Rp1.433 triliun atau 6,47% PDB, melampaui pertambangan dan tanaman pangan. Setelah penyesuaian harga global, NTB naik menjadi Rp1.467 triliun, menunjukkan kuatnya eksposur sawit pada pasar internasional. Dengan peran sebesar ini, kebijakan apa yang perlu diperkuat agar sawit terus memberi manfaat optimal bagi ekonomi Indonesia?

**Selengkapnya di halaman 9*

Harmoni Sawit dan Alam: IPOSS Gelar Diskusi dan Pemutaran Film Dokumenter

Pada 17 Oktober 2025, IPOSS menggelar diskusi publik dan pemutaran film *Palm Oil in the Land of Orangutans* di Jakarta bersama Copenhagen Film Company dan Copenhagen Zoo. Acara ini menyoroti perspektif baru sawit berkelanjutan, menampilkan proyek hutan koridor di Kalimantan Tengah yang menghubungkan perkebunan dan hutan lindung untuk melindungi orangutan. Para ahli menekankan pentingnya adaptive management dan kolaborasi lintas pihak. Bagaimana memperkuat peran sawit dalam diplomasi lingkungan Indonesia?

**Selengkapnya di halaman 4*



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Industri sawit Indonesia menghadapi tantangan alokasi bahan baku antara biodiesel, pangan, dan industri hilir, sekaligus tuntutan peningkatan nilai tambah di tengah dinamika global. Meski begitu, sawit tetap strategis, menyumbang hampir 6,5% PDB 2024. Hilirisasi terus didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga peran sawit sebagai pilar ekonomi, meski dibayangi tantangan kebijakan dan perubahan pasar internasional. Selamat membaca IPOSS Insights Edisi Ketigabelas!

Membangun Skema Klaim Karbon SAF: Siapa yang Diuntungkan?



Dunia berpacu menurunkan emisi, dan sektor penerbangan menjadi ladang inovasi tercepat. Di tengah kompetisi bahan bakar hijau global, Indonesia melihat peluang besar dari komoditas lamanya: kelapa sawit. Pemanfaatan limbah sawit untuk *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) membuka jalan baru dalam skema kredit karbon. Namun di balik optimisme itu, muncul pertanyaan mendasar: kalau sawit bisa jadi kredit karbon, siapa yang paling diuntungkan?

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia punya modal kuat di era ekonomi rendah karbon. Laporan *International Renewable Energy Agency* (IRENA) 2024 mencatat, Indonesia menghasilkan sekitar 7,5 juta ton residu biomassa pertanian per tahun yang bisa dijadikan bahan baku SAF. Dari limbah seperti pelepah, cangkang, dan tandan kosong, potensinya sangat besar. Pertamina bahkan mulai memproduksi SAF dari minyak jelantah dan menyiapkan tahap berikutnya untuk bahan baku berbasis sawit. Reuters (Agustus 2025) melaporkan, Pertamina telah mengirimkan batch perdana bahan bakar penerbangan rendah emisi ke pasar internasional.

Perdagangan karbon di dalam negeri juga mulai menggeliat. Data Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) menunjukkan, hingga pertengahan 2025 sudah ada jutaan ton kredit karbon diperdagangkan, termasuk dari proyek biogas limbah cair pabrik sawit atau POME (*Palm Oil Mill Effluent*). Pemerintah, lewat Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tengah menyiapkan kerangka agar perdagangan karbon dari sektor kehutanan dan perkebunan bisa masuk pasar global. Reuters mencatat, nilai potensial pasar karbon Indonesia bisa mencapai ratusan triliun rupiah per dekade bila sistem verifikasi solid.

Namun di lapangan, pelaksanaannya belum semulus harapan. Kajian BDPKS-IPB (2024) menunjukkan sebagian besar pabrik sawit kecil belum memiliki fasilitas penangkap gas metana dari limbah cair, padahal itu kunci untuk menghasilkan kredit karbon. Antara (Februari 2025) mencatat baru sekitar 30 persen pabrik sawit memiliki

instalasi biogas aktif. Sementara laporan IRENA dan Badan Litbang ESDM menyoroti mahalnya biaya sertifikasi ISCC-CORSIA yang sulit dijangkau petani kecil. Hambatan-hambatan teknis dan biaya ini membuat proyek SAF dan karbon sawit masih bertahan di tahap uji coba, belum bergerak ke skala industri. Akibatnya, petani kecil berisiko tertinggal, sementara industri energi besar justru lebih siap menikmati insentif hijau dari pasar global.

Secara global, SAF diatur melalui mekanisme *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA) yang digagas oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Hanya bahan bakar yang terbukti menurunkan emisi dan bebas deforestasi yang diakui. Lembaga riset Azzer (2025) menyebut, jika bahan baku SAF berasal dari lahan baru, intensitas karbonnya bisa lebih tinggi dari bahan bakar fosil. Karena itu, sertifikasi dan rantai pasok menjadi krusial. Pertamina sudah memperoleh sertifikasi ISCC-CORSIA untuk produksi SAF dari limbah minyak jelantah, menurut Argus Media (2025), yang memungkinkan pembeli mengklaim pengurangan emisi terukur.

Laporan *International Emissions Trading Association* (IETA, 2025) menilai Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi karbon yang cukup maju, tapi implementasinya masih membutuhkan transparansi dan distribusi manfaat yang adil. Jika dijalankan dengan benar, skema ini bisa menciptakan nilai baru: limbah sawit berubah jadi bahan bakar rendah emisi, petani memperoleh tambahan pendapatan, industri mendapat insentif hijau, dan negara memperkuat posisi di rantai energi bersih dunia. Namun jika hanya segelintir pihak yang menikmati, sawit akan kembali jadi komoditas global tanpa nilai tambah di dalam negeri.

Ujungnya, keberhasilan SAF tak diukur dari berapa besar kredit karbon yang dijual, tapi dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan — apakah petani ikut sejahtera, atau hanya industri besar yang terbang lebih dulu menuju masa depan hijau. (JH)

Dilema B50 Sawit: Lindungi Pasar Domestik, Tekan Ekspor Global



Kebijakan energi hijau yang kian ambisius membuat pemerintah harus berjalan di tali tipis antara stabilitas dan ekspor. Setelah target biodiesel B50 diumumkan untuk 2026, muncul wacana baru yang tak kalah sensitif: pembatasan ekspor CPO melalui skema *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin pasokan dalam negeri. Skenario ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit: memastikan pasokan domestik tetap aman tanpa mengguncang pasar ekspor yang menopang devisa.

Kekhawatiran itu berangkat dari proyeksi kebutuhan minyak sawit domestik yang melonjak tajam akibat program biodiesel. Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, penerapan B50 dapat meningkatkan serapan CPO dalam negeri hingga 4 juta ton per tahun, sementara ekspor berpotensi turun sekitar 5 juta ton. Gap ini membuat pasokan untuk kebutuhan pangan dan industri berisiko ketat, terutama jika harga global kembali naik seperti tren 2022–2023.

Opsi DMO kemudian muncul sebagai “rem darurat” untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap stabil. Dalam pernyataannya di pertengahan 2025, pemerintah menyebut tengah mengkaji mekanisme DMO sawit dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik. Langkah ini mirip dengan kebijakan DMO minyak goreng pada 2022, ketika ekspor sempat dibatasi demi menjaga stok di dalam negeri. Bedanya, kali ini konteksnya adalah kebijakan energi hijau, bukan krisis harga.

Namun, kebijakan DMO di tengah kenaikan konsumsi biodiesel menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku industri. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pembatasan ekspor berpotensi menekan devisa hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Data IPOSS (2024) menunjukkan, Total nilai ekspor produk sawit dan turunannya, yang mencakup 151 kode HS, tercatat sebesar US\$ 35 miliar. Jika sebagian besar pasokan dialihkan ke

biodiesel dan kebutuhan domestik, perusahaan eksportir akan kehilangan pangsa pasar — terutama di India, China, dan Pakistan yang kini menjadi tujuan utama.

Selain itu, efek domino terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani juga dikhawatirkan. Ekonom energi *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) memperingatkan bahwa kebijakan yang menahan ekspor bisa menekan harga TBS, karena pabrik mengurangi pembelian untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Sementara itu, harga minyak goreng di pasar domestik tetap fluktuatif dan tidak selalu mengikuti logika subsidi biodiesel.

Pemerintah beralasan bahwa langkah seperti *blending* harus dipertimbangkan secara “dinamis,” menyesuaikan dengan harga global dan realisasi B50. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR awal September 2025, Kementerian Investasi menegaskan perlunya mekanisme fleksibel agar stabilitas domestik tidak mengorbankan ekspor berlebih. Namun asosiasi industri meminta agar pemerintah tidak menggunakan DMO sebagai solusi jangka panjang, melainkan sebagai kebijakan darurat yang diiringi efisiensi rantai pasok.

Dari sisi fiskal, beban subsidi energi juga tidak kecil. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan (2025), subsidi untuk program biodiesel bisa menembus Rp 46 triliun per tahun, tergantung harga minyak dunia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berpotensi membatasi ruang fiskal untuk insentif petani kecil, padahal mereka ikut terdampak oleh perubahan arah pasar.

Jika kebijakan DMO benar-benar diberlakukan, maka Indonesia akan menghadapi dilema yang pelik: menjaga harga domestik agar rakyat tak terbebani, tapi dengan risiko kehilangan pasar dan devisa dari ekspor sawit. Dalam konteks ini, kebijakan energi hijau tidak lagi sekadar proyek teknologi, melainkan ujian keseimbangan antara kemandirian energi dan daya saing ekonomi. (JH)

Harmoni Sawit dan Alam: IPOSS Gelar Diskusi dan Pemutaran Film Dokumenter

Jakarta, 17 Oktober 2025 — Di tengah riuhnya perdebatan tentang sawit dan keberlanjutan, ada upaya kecil namun berarti yang berusaha menghadirkan sudut pandang lain. Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menggelar diskusi publik dan pemutaran film dokumenter *Palm Oil in the Land of Orangutans* di Jakarta. Acara ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Copenhagen Film Company dan Copenhagen Zoo, serta dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Film yang disutradarai oleh Dan Sall, sineas asal Denmark, membawa penonton pada perjalanan reflektif ke Kalimantan Tengah — tempat sawit, hutan, dan manusia berbagi ruang hidup. Ia tidak berbicara lantang, tapi bercerita dengan tenang: bahwa harmoni bisa tumbuh di tempat yang sering disalahpahami.

Ketua Pengurus IPOSS Nanang Hendarsah menyebut film ini sebagai upaya untuk memperluas cara pandang publik. “Film ini unik karena memperlihatkan kehidupan biodiversitas yang bisa hidup berdampingan di tengah perkebunan sawit. Kita perlu membangun narasi yang lebih adil terhadap sawit Indonesia,” katanya.

Film ini menampilkan hasil riset lapangan selama delapan tahun (2015–2023) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kolaborasi antara Copenhagen Zoo dan United Plantation melahirkan proyek “hutan koridor” seluas 318 hektare, yang menghubungkan area perkebunan dengan hutan lindung di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Melalui kamera yang jujur dan tenang, penonton diajak melihat bagaimana orangutan, burung, dan satwa liar lain tetap hidup berdampingan di lanskap sawit yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Acara dibuka oleh Heru Hartanto Subolo, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya diplomasi lingkungan bagi citra Indonesia. “Melalui kegiatan seperti ini, kita menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap kritik, tapi mengajak dunia melihat bukti nyata praktik sawit yang lestari,” ujarnya. Turut hadir pula para Dewan Pengawas IPOSS — Darmin Nasution, Sofyan A. Djalil, dan Yuri Octavian Thamrin — yang menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat komunikasi publik dan diplomasi sawit Indonesia di kancah internasional.

Dalam sesi diskusi, Simon Bruslund, Director of Global Development Copenhagen Zoo, menjelaskan pentingnya forest corridor sebagai jalur hidup satwa liar yang menghubungkan hutan dan kebun. Ia juga membagikan hasil penelitiannya tentang penurunan populasi burung di sekitar Tanjung Puting. “Ketika spesies burung menurun, itu pertanda awal ekosistem sedang terganggu,” katanya.

Sementara itu, Carl Traeholt, Manager International Project Development Copenhagen Zoo, menyoroti tanggung jawab kolektif semua pihak dalam menjaga keberlanjutan. “Sawit berkelanjutan bukan hanya urusan produsen, tapi juga konsumen dan regulator,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya adaptive management—cara pengelolaan yang menyesuaikan diri dengan dinamika alam.

Pakar kehutanan dan lingkungan Petrus Gunarso menambahkan, pembaruan data hutan dan perlindungan terhadap keystone species seperti orangutan dan harimau mutlak dilakukan. “Spesies kunci adalah indikator kesehatan ekosistem. Kalau mereka hilang, artinya ada yang salah di alam,” ujarnya.

Bagi IPOSS, kegiatan ini bukan sekadar pemutaran film, tapi ruang dialog yang mempertemukan sains, diplomasi, dan empati. Film *Palm Oil in the Land of Orangutans* memperlihatkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar konsep, melainkan praktik yang bisa tumbuh dari kerja sama dan kesadaran bersama.

Lebih jauh lagi, film ini juga menjadi bentuk diplomasi lunak — *soft diplomacy* — yang berbicara dengan bahasa yang paling universal: gambar, pengalaman, dan rasa ingin tahu. Di tengah derasnya kampanye negatif terhadap sawit, karya ini menjadi jembatan komunikasi, menunjukkan bahwa di balik kontroversi, ada kisah nyata tentang perbaikan dan harapan.

Pada akhirnya, sawit bukan hanya soal ekonomi atau emisi, tapi juga tentang cara manusia memaknai keseimbangan. Melalui kegiatan ini, IPOSS menegaskan perannya sebagai jembatan antara riset, kebijakan, dan diplomasi — agar masa depan sawit Indonesia tidak hanya produktif, tapi juga lestari. (JH)

Acara ini didukung oleh Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kopenhagen, dan Copenhagen Zoo, serta dihadiri oleh akademisi, diplomat, dan pegiat lingkungan.

B100 Sawit Indonesia: Ekspansi Lahan, haruskah?

Target B100 menuntut peningkatan pasokan CPO nasional dalam skala besar. Jika ekspansi lahan bukan pilihan, maka mandatory peningkatan produksi menjadi keharusan.

Ketika dunia bergerak menuju kemandirian energi hijau, Indonesia menetapkan target besar menuju implementasi B100, bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Target ini bukan hanya soal energi, tetapi juga ujian bagi kemampuan nasional menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi, keberlanjutan ekosistem sawit, dan kesinambungan program biodiesel itu sendiri. Pertanyaan krusialnya, apakah pemenuhan B100 harus ditempuh melalui ekspansi lahan?

Secara historis, *yield* CPO nasional cenderung stagnan di kisaran 3,0–4,0 ton per hektare, dengan tren yang relatif datar selama lebih dari satu dekade. Pada saat yang sama, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Pertanian mencatat luas tutupan sawit terkini mencapai 17,19 juta hectare, tetapi luas tanaman menghasilkan (TM) menurut BPS hanya 13,1 juta hektare atau sekitar 76% dari total luas tersebut. Dengan produksi sekitar 47,5 juta ton CPO, maka *yield* CPO nasional berada di kisaran 3,6 ton per hektare, sebuah gambaran stagnasi produktivitas yang cukup lama.

Ironinya, kebutuhan CPO untuk biodiesel justru meningkat. Penurunan *lifting* minyak bumi dan kebijakan pengurangan impor solar dapat mendorong percepatan implementasi B100. Permintaan biodiesel pada level ini diperkirakan mencapai 40 juta kiloliter per tahun, yang berarti diperlukan sedikitnya 35 juta ton CPO sebagai *feedstock*.

Jika B100 diterapkan pada 2026, ekspor CPO berpotensi turun hingga 70 persen dibandingkan 2025, sehingga penerimaan dari pungutan ekspor bisa berkurang hingga 60 persen dan hanya menyisakan sekitar Rp18 triliun. Padahal angka tersebut jauh dari cukup, karena pembiayaan B100 diperkirakan memerlukan sekitar Rp100 triliun per tahun dengan asumsi alokasi PSO 48 persen dan harga keekonomian tetap.

Situasi ini menegaskan bahwa peningkatan produksi nasional menjadi kebutuhan strategis, baik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel maupun menjaga kapasitas ekspor sebagai sumber pendanaan program. Tantangannya, kebutuhan produksi untuk menopang B100 secara penuh dapat mencapai 135 juta ton CPO. Maka dengan *yield* 3,6 ton per hektare, diperlukan ekspansi areal sawit menjadi 44 juta hektare, atau 2,5 kali lipat luas tutupan saat ini. Tentu skenario ini tidak realistis mengingat keterbatasan lahan dan regulasi tata ruang, serta persoalan lingkungan dan kehutanan yang masih berlangsung.

Karena ekspansi lahan tidak mungkin dilakukan, peningkatan produksi harus dicapai melalui kenaikan *yield*. Untuk memenuhi kebutuhan 135 juta ton CPO tanpa membuka lahan baru, *yield* perlu ditingkatkan hingga 9,1 ton per hektare, sesuai potensi bahan tanam unggul, dengan asumsi luas tanaman menghasilkan meningkat menjadi 14,8 juta hektare atau 86 persen dari total tutupan sawit. Pencapaian tersebut memerlukan transformasi besar, mulai dari disiplin peremajaan sawit, perbaikan praktik budidaya, hingga penerapan teknologi presisi secara luas di seluruh segmen perkebunan yang sangat sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dalam konteks inilah *mandatory* peningkatan produksi menjadi penting. Ketika kebijakan energi menetapkan *mandatory demand* melalui B100, sisi *supply* pun harus tumbuh secara terukur dan konsisten. Tanpa kewajiban peningkatan produksi, target B100 justru akan membebani sektor perkebunan, menekan ekspor, serta melemahkan kapasitas negara membiayai program biodiesel.

Langkah ini menuntut penguatan basis produksi dari hulu hingga hilir. Pertama, benih unggul bersertifikat harus tersedia dalam jumlah memadai dan wajib digunakan di semua segmen termasuk kebun rakyat yang masih didominasi benih tidak bersertifikat. Kedua, konservasi tanah dan air perlu diperkuat karena menjadi fondasi agronomi yang menentukan efisiensi nutrisi dan stabilitas produksi, termasuk penggunaan sistem irigasi yang terkontrol. Ketiga, penerapan *Best Management Practices* dan teknologi presisi harus diperluas melalui pemupukan berbasis data dengan sistem fertigasi, pengendalian hama terpadu, pemantauan presisi, serta digitalisasi manajemen data. Keempat, tata kelola industri perlu ditata ulang agar masalah tumpang tindih lahan, perizinan, dan ketertelusuran dapat selesai tanpa mengganggu iklim investasi.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia dapat memasuki fase produktivitas tinggi, di mana peningkatan *yield* menjadi strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi, memperkuat neraca perdagangan, dan memastikan keberlanjutan pendanaan biodiesel. Namun, target *yield* sekitar 9,1 ton/ha tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat; diperlukan upaya bertahap dan konsisten di seluruh pelaku industri untuk mencegah ekspansi lahan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. (DHP)

Hilirisasi Sawit: Mendorong Nilai Tambah di Tengah Persaingan Alokasi Bahan Baku

Industri kelapa sawit telah lama menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari hulu perkebunan hingga hilir industri pengolahan, sektor ini menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan puluhan juta keluarga. Sepanjang 2024, produksi CPO dan CPKO mencapai sekitar 53 juta ton, menghasilkan nilai tambah sekitar USD 28 miliar atau setara Rp 434 triliun. Capaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin global dengan pangsa hampir 60% produksi minyak sawit dunia.

Namun, di tengah meningkatnya permintaan terhadap energi terbarukan, alokasi bahan baku sawit menjadi tantangan utama. Kebutuhan untuk biodiesel akan meningkat seiring kebijakan pemerintah yang menargetkan kenaikan mandatori biodiesel dari B40 menjadi dan B50. Sementara itu, sektor pangan dan oleokimia tidak mungkin dikurangi alokasinya karena berisiko mengganggu stabilitas industri hilir dan bahkan ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks ini, persaingan alokasi minyak sawit antara kebutuhan energi, pangan, dan industri kimia menjadi keniscayaan, baik di untuk pasar domestik maupun internasional. Karena itu, diperlukan langkah strategis berbasis optimalisasi nilai tambah, agar setiap ton minyak sawit yang diproduksi memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat dan negara, sekaligus menjaga keseimbangan antar sektor dalam rantai pasok industri sawit nasional.

Kebijakan mandatori biodiesel berperan penting dalam menekan impor bahan bakar fosil dan mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Namun, peningkatan serapan CPO untuk biodiesel perlu memperhatikan perbedaan nilai tambah antar sektor pengguna. Misalnya, pada sektor bioenergi, konversi CPO menjadi biodiesel hanya menambah sekitar USD 80–90 per ton dari total nilai bahan baku. Sementara di sektor oleokimia dan pangan olahan, nilai tambah bisa mencapai USD 200 hingga lebih dari USD 400 per ton, tergantung pada tingkat pengolahan dan jenis produknya. Produk seperti *fatty acid*, *glycerine*, surfaktan, hingga *specialty fats* dan margarin premium memiliki rantai nilai yang jauh lebih panjang serta berkontribusi langsung pada ekspor, lapangan kerja, dan daya saing industri.

Selain keseimbangan antar sektor, kebijakan alokasi sawit juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap ekspor dan penerimaan negara. Ketika porsi CPO yang dialihkan ke biodiesel meningkat terlalu cepat tanpa diimbangi peningkatan produksi, potensi volume ekspor akan menurun signifikan. Dampaknya berlapis: harga CPO naik, devisa dari



ekspor menurun, dan total penerimaan negara dari Pajak Ekspor (PE) serta Bea Keluar (BK) ikut terpengang, meskipun harga referensi meningkat.

Kenaikan harga CPO di tingkat global memang menguntungkan sementara, yang juga dapat mendorong lonjakan harga TBS di tingkat petani. Namun, di sisi lain dapat menjadi beban harga bahan baku bagi industri hilir. Akibatnya, industri pengolahan dalam negeri menghadapi tekanan biaya tinggi, sementara stabilitas harga di tingkat konsumen menjadi rentan inflasi.

Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan: di satu sisi, ekspansi biodiesel memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor BBM; namun di sisi lain, penurunan volume ekspor CPO dapat menekan arus devisa dan menimbulkan tekanan inflasi di pasar domestik. Karena itu, optimalisasi nilai tambah nasional juga harus mencakup optimalisasi penerimaan negara, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara volume ekspor, konsumsi energi domestik, nilai tambah industri hilir, dan kesejahteraan petani sawit.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan biodiesel tidak dapat berjalan terpisah dari strategi hilirisasi dan ekspor. Indonesia memerlukan kerangka kebijakan terpadu yang mengaitkan *feedstock allocation* dan *export optimization*, agar setiap ton minyak sawit memberikan manfaat maksimal, bukan hanya untuk industri energi, tetapi juga bagi stabilitas harga, devisa, penerimaan negara, dan kesejahteraan petani sawit di seluruh Indonesia. (SN)

Pengusulan SAF Berbasis POME: Upaya Indonesia Menuju Pengakuan Global

Langkah Indonesia memperjuangkan pengakuan ICAO bagi bahan bakar penerbangan berkelanjutan berbasis limbah sawit



Indonesia tengah memasuki fase penting dalam upaya memperoleh pengakuan internasional bagi *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) berbasis limbah sawit. Sejak November 2024, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan RI telah mengajukan usulan nilai *default* emisi SAF berbasis *Palm Oil Mill Effluent* (POME) kepada sekretariat ICAO. POME, limbah cair dari pengolahan CPO di pabrik kelapa sawit, memiliki keunggulan karena telah diakui sebagai *residue* dalam daftar positif *feedstock* SAF pada skema CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*), dengan nilai *Induced Land Use Change* (ILUC) = 0.

Meski demikian, memperoleh nilai *default* bukan perkara mudah. ICAO mensyaratkan perhitungan menyeluruh terhadap emisi produksi SAF berbasis *Life Cycle Assessment* (Core LCA), bila digabungkan dengan emisi ILUC, harus menunjukkan emisi sekurangnya 10% lebih rendah dibanding emisi jet konvensional (89 gCO₂e/MJ). Berbeda dengan CPO, kajian LCA untuk POME dihitung dari pengumpulan minyak dari kolam limbah hingga distribusi SAF ke bandara, tanpa memasukkan emisi dari budidaya dan pengolahan TBS di pabrik.

Usulan Indonesia tersebut telah disetujui pada 30 Oktober 2025 yang lalu, secara teknis oleh *Fuel Task Group* (FTG) Board pada pertemuan ke-2 *Working Group 5* di São Paulo, Brasil, dan kini menunggu pengesahan di Dewan ICAO. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi bahan baku SAF nasional, setelah sebelumnya, ICAO telah mengakui bahan baku lain yang tersedia di Indonesia seperti *used cooking oil* (UCO), *palm fatty acid distillate* (PFAD), dan CPO dengan *methane capture*. Hadirnya POME tentunya akan menguatkan posisi Indonesia sebagai penyedia bahan baku SAF.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah melaksanakan dua kali uji coba SAF, masing-masing pada tahun 2023 dan 2025. Uji pertama menggunakan bahan baku RBDPKO dengan

teknologi *Coprocessing Hydroprocessed Esters and Fatty Acids* (Co-HEFA). Sedangkan uji kedua memakai bahan baku yang sudah masuk dalam daftar CORSIA, yaitu UCO, dengan tingkat pencampuran 3% pada teknologi yang sama.

Kedua uji coba ini menunjukkan performa penerbangan yang stabil, dan membuktikan industri SAF nasional mampu memenuhi standar teknis internasional. Ke depan, penggunaan bahan baku berkelanjutan yang berasal dari limbah, *by-product*, atau *residue* seperti UCO, PFAD, dan POME, akan semakin menguntungkan Indonesia. Selain nilai emisi yang sangat rendah, juga potensi pasokan ketiganya diperkirakan lebih dari 4 juta ton per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok SAF global hingga 2030.

Meski demikian, pengakuan global tidak berhenti pada aspek nilai emisi. SAF dari Indonesia juga harus memenuhi sistem CORSIA *Sustainability Certification Scheme* (SCS) agar setiap penggunaannya oleh maskapai internasional dapat diklaim secara sah sebagai pengurangan emisi karbon. Selain itu, ICAO menegaskan pentingnya penerapan *credible accounting* sebagai dasar untuk menelusuri, mengklaim, dan mengukur penggunaan SAF secara akurat. Berbagai *fuel accounting systems* yang berlaku di pasar internasional, akan dieksplorasi termasuk sistem *book-and-claim*.

Bagi Indonesia, kerangka ini menjadi acuan langsung dalam memperkuat langkah nasional menuju pengakuan global. Di Tengah langkah awalnya untuk pengajuan nilai default LCA SAF untuk POME tengah diperjuangkan oleh tim nasional. Namun, pekerjaan besar berikutnya terletak pada dua agenda yakni: membangun sistem *traceability* nasional yang terintegrasi dan memperkuat diplomasi teknis di tingkat internasional dalam penetrasi produk limbah berbasis sawit. Kedua aspek ini akan menentukan seberapa jauh dunia mempercayai integritas rantai pasok SAF Indonesia serta keberterimaan produk SAF berbasis industri sawit di tingkat global.

Pada akhirnya, perjalanan menuju pengakuan global ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga kredibilitas dan transparansi tata kelola. Apabila nilai default LCA POME disetujui ICAO dan sistem *traceability* nasional berhasil dibangun, industri sawit Indonesia dapat melangkah lebih jauh dari sekadar produsen sawit terbesar dunia, menjadi pionir solusi penerbangan rendah karbon yang diakui dunia. (DS)

Refleksi Satu Abad Kelapa Sawit: Praktik Keberlanjutan yang Nyata di Tengah Tuntutan Keberlanjutan Global

Menakar kembali keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam perjalanan keberlanjutan sawit Indonesia



Lebih dari satu abad industri kelapa sawit Indonesia telah berdiri. Berawal dari inisiatif seorang agronomis asal Belgia yang menanam kelapa sawit secara komersial di Sungai Liput, Aceh Tamiang, dan Pulu Raja, Sumatera Utara, pada 18 November 1911. Dari 50 ribu bibit yang ditanam di lahan seluas 336 hektare, industri ini kini berkembang menjadi lebih dari 17 juta hektare, menjadikan Indonesia produsen utama dalam perdagangan minyak nabati dunia.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan telah menjadi bagian dari perjalanan industri sawit Indonesia jauh sebelum John Elkington memperkenalkan konsep *triple bottom line* pada tahun 1994, maupun sebelum lahirnya sistem sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO, ISPO, dan ISCC. Artinya, prinsip 3P (*People, Profit, dan Planet*) telah lama hidup dalam praktik industri sawit dan menjadi fondasi yang memungkinkan sektor ini bertahan lintas generasi.

Seiring waktu, makna keberlanjutan dalam industri sawit semakin terdefinisi secara formal melalui berbagai instrumen sertifikasi dan kebijakan global. Standar seperti RSPO, ISPO, dan ISCC menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa produksi sawit harus memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi secara terpadu dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip 3P tersebut

sering kali belum berjalan proporsional. Keberlanjutan lebih sering diidentikkan dengan pilar lingkungan (*Planet*), sementara pilar manusia (*People*) dan ekonomi (*Profit*) kerap terpinggirkan. Padahal, keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila ketiga pilar tersebut saling menopang — ketika kesejahteraan sosial tumbuh seiring dengan keberlanjutan usaha sawit yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip 3P secara terpadu menjadi sangat penting, mengingat keberlanjutan industri sawit hanya dapat tercapai melalui kesinambungan antarprinsip tersebut. Keberlanjutan sulit terwujud bila salah satu pilar mendominasi dan mengabaikan dua lainnya. Misalnya, dominasi pada aspek lingkungan (*Planet*) tanpa mempertimbangkan profitabilitas (*Profit*) akan menimbulkan beban biaya tinggi yang sulit ditanggung karena keterbatasan kapasitas pembiayaan perusahaan. Sebaliknya, ketika fokus berlebihan pada aspek sosial (*People*) tanpa keseimbangan ekonomi, perusahaan dapat menghadapi tekanan finansial yang mengganggu keberlangsungan usaha. Begitu pula jika hanya mengejar keuntungan (*Profit*) dengan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka risiko penurunan mutu lingkungan dan konflik sosial menjadi tak terelakkan, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional dan keberlanjutan industri itu sendiri.

Pada akhirnya, keberlanjutan industri sawit Indonesia tidak dapat diukur dari satu dimensi, melainkan dari keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan nilai ekonomi. Inilah esensi keberlanjutan yang selama ini dijalankan oleh industri sawit nasional — menerapkan prinsip 3P (*People, Planet, Profit*) secara nyata, bukan sekadar jargon. Selama lebih dari satu abad, sawit telah membuktikan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan zaman: dari masa kolonial hingga era kemerdekaan, dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga menjadi sumber energi hijau dan penopang utama perekonomian nasional.

Ke depan, keberhasilan industri yang terus berkembang ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga keseimbangan antar pilar 3P — menjadikan keberlanjutan sebagai budaya bersama, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan komitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha dan masa depan bumi. (MA)

Kontribusi Ekonomi Sawit 2024: Peran Strategis dalam Perekonomian Nasional



Selama ini, kontribusi industri kelapa sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia umumnya dihitung hanya dari nilai tambah sektor perkebunan dan pengolahan crude palm oil (CPO). Pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan cakupan ekonomi sawit secara utuh, karena rantai nilainya mencakup industri makanan, kosmetik, kimia, energi, logistik, hingga perdagangan. Akibatnya, kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sering kali terlihat lebih kecil dibanding peran ekonomi sebenarnya.

Setiap ton CPO yang diproduksi tidak hanya menciptakan nilai di pabrik, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi lintas sektor. Program biodiesel mengurangi impor bahan bakar, sementara industri makanan olahan, sabun, kosmetik, dan oleokimia bergantung pada pasokan bahan baku sawit. Aktivitas transportasi, perdagangan, hingga logistik turut bergerak mengikuti dinamika produksi sawit. Hal ini menunjukkan kuatnya multiplier effect sawit melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*).

Untuk menggambarkan kontribusi riil sawit terhadap ekonomi nasional, pendekatan yang paling tepat adalah

menggunakan konsep Nilai Tambah Bruto (NTB) berbasis PDB atas dasar harga berlaku (ADHB). NTB mengukur selisih antara nilai output dan konsumsi antara selama proses produksi. Pendekatan ini memungkinkan seluruh rantai nilai sawit—mulai dari benih, perkebunan, pabrik kelapa sawit (PKS), refinery, biodiesel, hingga industri turunannya—terwakili dalam perhitungan. Dengan demikian, nilai ekonomi sawit tidak berhenti pada CPO saja, tetapi mencerminkan ekosistem industri berbasis sawit secara keseluruhan.

Perhitungan IPOSS menunjukkan bahwa NTB sektor sawit tahun 2024 mencapai Rp1.433 triliun ketika seluruh output dinilai menggunakan harga domestik. Metode ini bersifat konservatif karena seluruh produk—CPO, minyak goreng, FAME, hingga oleokimia—menggunakan harga dalam negeri yang cenderung lebih rendah dibanding harga pasar global. Dengan basis ini, kontribusi sawit mencapai 6,47% terhadap PDB.

Jika dibandingkan dengan total PDB Indonesia tahun 2024 sebesar Rp22.139 triliun, kontribusi 6,47% tersebut sudah melampaui sektor pertambangan batubara ($\pm 3\text{--}5\%$), jauh di atas sektor tanaman pangan utama seperti padi ($\pm 3\%$), dan lebih besar daripada gabungan seluruh komoditas perkebunan non-sawit yang nilainya kurang dari 1,5% PDB. Temuan ini menegaskan bahwa sawit merupakan salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian nasional.

Namun, ketika sebagian produk sawit yang diperdagangkan di pasar internasional dinilai menggunakan harga FOB rata-rata tahunan, sementara seluruh input dan komponen domestik tetap dihitung dengan harga lokal, total NTB meningkat menjadi Rp1.467 triliun atau 6,63% terhadap PDB. Penyesuaian harga global tersebut menambah nilai sekitar Rp34 triliun dan menunjukkan bahwa sebagian nilai ekonomi sawit Indonesia memang terekspos pada dinamika pasar internasional. Baik pendekatan harga domestik maupun FOB menunjukkan konsistensi hasil: kontribusi ekonomi sawit tetap besar dan signifikan secara makro.

Besarnya kontribusi ini menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri sawit. Kepastian regulasi, penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan dukungan bagi petani menjadi faktor kunci agar industri sawit tetap mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan mendukung transformasi industri berbasis *bioresources* ke depan. (RFY)

Blockchain Sawit, Penguat Sistem Data Berbasis Bukti

Penguatan sistem data yang mencakup identitas pekebun, legalitas lahan, dan geolokasi menjadi kunci dalam mendukung due diligence di sektor sawit. Kementerian Pertanian menekankan pentingnya penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan memastikan keberlanjutan industri sawit (Kementerian Pertanian, 2023). Sejalan dengan itu, penggunaan teknologi seperti blockchain dan pemetaan spasial dapat memperkuat ketelusuran dan memfasilitasi verifikasi pihak ketiga, yang semakin dibutuhkan untuk memenuhi standar global dan regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu opsi teknologi, blockchain berfungsi sebagai ledger terdistribusi yang sulit diubah untuk menautkan geolokasi, dan perpindahan batch menjadi jejak audit yang tamper-evident. Inisiatif riset domestik menilai kombinasi *blockchain* dengan verifikasi spasial dan *Internet of Things* (IoT) untuk pertanian presisi, termasuk pemetaan profil pekebun dan kondisi lahan (BRIN-IPB, 2024).

Bukti praktik juga hadir dari pelaku Indonesia. PT Surveyor Indonesia mengembangkan platform ketelusuran multi-komoditas guna memenuhi kebutuhan verifikasi sumber bahan baku, rancangan teknisnya menyebut pemanfaatan blockchain untuk integritas data dan keamanan pertukaran antar-pihak.

Di ranah akademik, penelitian IPB mengusulkan kerangka *PalmChain-as-a-Service* bagi rantai pasok sawit rakyat untuk menjawab isu transparansi, efisiensi, dan keadilan distribusi nilai; model ini menekankan identitas pekebun, koordinat plot, dan *chain-of-custody* yang ditambatkan pada *ledger* (Afrianto et al., 2025). Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa peningkatan ketelusuran adalah respons kunci menghadapi standar importir, dan menempatkan infrastruktur data sebagai fondasi intervensi.

Pemerintah perlu menyiapkan ekosistem data yang matang, termasuk di dalamnya terdapat *dashboard digital* untuk pemantauan berbagai komoditas pertanian, termasuk sawit sebagai upaya peningkatan transparansi dan kepatuhan standar ketelusuran. Langkah ini perlu diperkuat integrasi dengan teknologi *blockchain*, tempat ledger dapat berperan sebagai penjamin integritas.

Implikasinya, penguatan data berbasis blockchain memberi tiga manfaat makro: (i) mengurangi asimetri informasi dan biaya sengketa data; (ii) mempermudah verifikasi pihak ketiga pada standar pasar, termasuk ketentuan geolokasi petak dan larangan pencampuran pada rezim seperti EUDR

tanpa membuka rahasia dagang, dan (iii) meningkatkan kesiapan pekebun kecil melalui onboarding bertahap yang mengaitkan identitas, legalitas, dan lokasi. Dengan demikian, fondasi data yang rapi dan ledger yang audit-ready bukan sekadar adopsi teknologi baru, melainkan instrumen kredibilitas untuk menjaga akses pasar dan kualitas pertumbuhan industri sawit Indonesia.

Implementasi *blockchain* memerlukan infrastruktur digital yang memadai, literasi teknologi yang merata di kalangan petani, serta investasi awal yang mungkin diperlukan. Adopsi teknologi baru selalu memerlukan adaptasi dan dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri sawit (termasuk asosiasi seperti GAPKI), dan penyedia teknologi menjadi kunci untuk merancang standar yang sesuai dengan kebutuhan spesifik industri sawit Indonesia.

Proyek percontohan (*pilot project*) yang terfokus pada segmen rantai pasok tertentu, serta edukasi dan sosialisasi intensif kepada petani, merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Blockchain bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah revolusi yang mampu mentransformasi cara industri kelapa sawit beroperasi. Dengan membangun sistem pendataan produksi yang kredibel, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan daya saing komoditasnya di pasar global, tetapi juga membuktikan komitmennya terhadap praktik agrikultur yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan industri sawit Indonesia yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya. (FGK)



Dilema B50 dan Jalan Tengah Energi Hijau: Memanfaatkan Potensi POME dan Minyak Jelantah

Kenaikan kebutuhan CPO untuk biodiesel menekan stok dan ekspor. Minyak limbah seperti POME dan jelantah menawarkan jalan tengah bagi energi hijau yang berkelanjutan.

Ketika dunia berlomba mencari energi hijau, Indonesia sudah lebih dulu melangkah lewat sawit. Sejak mandatori biodiesel dimulai dari B2.5 pada 2009 hingga kini mencapai B40 dan ditargetkan menuju B50 pada 2026, program ini telah menjadi simbol kemandirian energi sekaligus kebanggaan nasional. Sawit tak lagi sekadar komoditas ekspor, tetapi juga menjadi bahan bakar menuju ekonomi rendah karbon.

Namun di balik capaian tersebut, muncul tantangan baru. Setiap kenaikan campuran biodiesel berarti meningkatnya serapan minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri. Ketika produksi tidak bertambah signifikan, tekanan terhadap pasokan pangan, oleokimia, dan ekspor akan semakin besar. Pertanyaannya, mampukah Indonesia memperluas mandatori biodiesel tanpa mengorbankan keseimbangan sektor lain?

Pada tahun 2024, produksi CPO dan CPKO nasional mencapai sekitar 53 juta ton. Dari jumlah itu, 11,5 juta ton dialokasikan untuk biodiesel (B35), 8,3 juta ton untuk industri pangan, dan 3,7 juta ton untuk industri oleokimia, sementara ekspor tetap tinggi di angka 29,5 juta ton. Keseimbangan ini mulai bergeser seiring target B40 pada 2025 yang mendorong kebutuhan biodiesel menjadi 15,6 juta kiloliter atau setara 13,5 juta ton CPO. Jika program B50 terealisasi pada 2026, kebutuhan biodiesel akan melonjak menjadi 20 juta kiloliter atau sekitar 17,5 juta ton CPO. Artinya, dalam dua tahun ke depan, alokasi untuk energi naik lebih dari 6 juta ton, lonjakan yang berpotensi memperketat stok domestik, ekspor dan memicu persaingan antar sektor pengguna.

Berdasarkan kajian internal IPOSS, stok CPO nasional cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, seiring meningkatnya permintaan untuk biodiesel. Sementara itu, produksi di sektor hulu belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kondisi ini berpotensi mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan ekspor untuk menjaga ketersediaan bahan baku biodiesel di dalam negeri. Hal ini memang dapat menjamin pasokan energi hijau, tetapi berisiko menurunkan volume ekspor serta mengurangi penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor. Dengan kata lain, kebijakan pro energi berpotensi menciptakan dilema baru pada stabilitas stok dan devisa negara.



Untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan CPO, diversifikasi bahan baku biodiesel menjadi langkah yang tak terelakkan. Dua sumber alternatif yang menjanjikan adalah minyak POME (*Palm Oil Mill Effluent*) dan minyak jelantah atau UCO (*Used Cooking Oil*). Keduanya telah diakui secara internasional oleh Uni Eropa sebagai *advanced biofuel* yang berisiko rendah terhadap ketahanan pangan dan rendah emisi. Meski tantangan pengumpulan yang kompleks, namun dengan optimalisasi sistem pengumpulan dan dukungan kebijakan yang tepat, kedua sumber ini berpotensi menyediakan bahan baku biodiesel alternatif terutama untuk menggantikan ekspor yang terdampak.

Kunci keberhasilan program B50 tidak semata terletak pada peningkatan kadar campuran biodiesel, tetapi pada bagaimana memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasar CPO domestik maupun ekspor. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan konsumsi energi berbasis sawit tetap berjalan dalam kerangka rantai pasok yang seimbang, sehingga tidak menimbulkan tekanan pada sektor hilir atau menggeser harga akibat perubahan permintaan yang terlalu cepat.

Pemanfaatan minyak limbah seperti POME dan UCO dapat menjadi solusi strategis, bukan hanya sebagai penyangga kebutuhan biodiesel, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi sirkular yang rendah emisi. Pendekatan ini akan memperluas siklus nilai sawit dari hulu ke hilir secara lebih berkelanjutan, menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi berbasis bioekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. (DHP)

Reformasi Kelembagaan Sawit: Menuju Otoritas Nasional yang Terpadu

Analisis Kebutuhan Pembentukan Badan Sawit Nasional untuk Mengatasi Tumpang Tindih Lintas K/L

Tata kelola sawit nasional menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor yang kian kompleks. Sawit merupakan komoditas strategis yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L), mulai dari Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Keuangan, yang masing-masing memiliki mandat dan regulasi sesuai bidangnya, namun belum memiliki mekanisme koordinasi yang menyatukan arah kebijakan, basis data, dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Akibatnya, sinkronisasi kebijakan masih bergantung pada forum sektoral yang sifatnya sementara.

Hambatan koordinasi ini berdampak langsung pada penyelesaian legalitas lahan, yang kemudian menghambat akses pembiayaan petani, termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Banyak kebun rakyat yang tidak produktif belum dapat diremajakan karena status lahan belum jelas, sehingga produktivitas petani tertahan di kisaran 3,3 ton CPO per hektare, jauh di bawah potensi 6–7 ton. Di sisi lain, tekanan global seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) menuntut legalitas dan keterlacakan penuh, yang sulit dipenuhi tanpa sistem data terpadu antarinstansi.

Salah satu opsi perbaikan adalah pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN). Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI menegaskan perlunya lembaga di bawah Presiden yang mampu mengintegrasikan tata kelola hulu–hilir dan mencegah maladministrasi akibat tumpang tindih kewenangan lintas K/L. BSN tidak dimaksudkan mengambil alih fungsi K/L, tetapi menjadi simpul koordinatif yang memastikan kebijakan, data, dan implementasi berjalan konsisten serta saling melengkapi.

Pembelajaran dari Malaysian Palm Oil Board (MPOB) memperlihatkan manfaat integrasi fungsi riset, regulasi, dan promosi dalam satu otoritas. Malaysia mampu menjaga produktivitas hingga di atas 3,5 ton CPO per hektare dan memperluas hilirisasi hingga oleokimia dan kosmetik. Dengan skala industri yang jauh lebih besar, Indonesia memerlukan kelembagaan serupa, tetapi disesuaikan dengan kompleksitas tata kelola domestik, agar kebijakan hulu–hilir berjalan lebih sinergis dan berorientasi jangka panjang.

BSN diharapkan mempercepat penataan kebun sawit di kawasan hutan melalui integrasi data spasial Kementan–Kemenhut–ATR/BPN serta mengonsolidasikan kebijakan industri, riset, dan promosi di sektor hilir. Namun keberhasilan pembentukannya sangat bergantung pada *political will* pemerintah untuk mengatasi tarik-menarik kepentingan sektoral yang selama ini menghambat konsolidasi tata kelola sawit nasional. Sayangnya, wacana pembentukan badan koordinatif sawit selama ini berulang kali terhenti karena lemahnya komitmen politik.

Agar tidak sekadar menjadi wacana, pembentukan BSN memerlukan dasar hukum yang kuat melalui RUU Perkelapasawitan. Undang-undang ini penting untuk memberikan legitimasi, mandat koordinatif, serta kejelasan fungsi lembaga dalam mengintegrasikan data perizinan, tata ruang, legalitas lahan, sertifikasi ISPO, dan pengawasan rantai pasok. Pengembangan basis data tunggal yang dihasilkan melalui lembaga ini dapat menjadi fondasi bagi penyelesaian legalitas lahan, percepatan PSR, peningkatan produktivitas, dan penguatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan global.

Kehadiran BSN merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan industri sawit, memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam tata kelola sawit berkelanjutan. Terbentuknya lembaga ini mencerminkan komitmen negara dalam mengelola sumber daya strategis bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahap ini, *political will* pemerintah menjadi faktor penentu untuk memastikan reformasi kelembagaan berjalan efektif, konsisten, dan berpihak pada penguatan tata kelola sawit nasional yang lebih transparan, berdaya saing, serta berorientasi jangka panjang. (DS)



Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djallil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id